

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 (Studi pada BAPPERIDA Kota Bandar Lampung)

Implementation of the Poverty Alleviation Policy in Bandar Lampung City in 2023: A Study at the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency (BAPPERIDA) of Bandar Lampung City

Hanifah Sasabela^{1*}, Darmawan Purba²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01 September 2026

Revised 05 September 2026

Accepted 7 September 2026

Available online 09 September 2026

Keywords

Policy Implementation, Poverty Alleviation, Edward III, Resources, Bandar Lampung City



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of poverty alleviation policies in Bandar Lampung City in 2023 using George C. Edward III's policy implementation theory, which emphasizes four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research employs a qualitative descriptive method, with data collected through field observation, in-depth interviews with relevant officials, and documentation of policy and program implementation. The findings indicate that the policy implementation has not been optimal. A key obstacle is the limited availability of competent human resources and insufficient budget allocation. Moreover, communication among implementing agencies is often ineffective and inconsistent, leading to miscoordination in program execution. The disposition or commitment of policy implementers also varies, with some showing a lack of initiative and active involvement. The bureaucratic structure is rigid and hierarchical, delaying coordination and decision-making processes. Given that poverty is a multidimensional issue, it requires rapid and collaborative responses. This study concludes that the success of policy implementation depends heavily on integrated and effective communication, adequate resource availability, strong

implementer commitment, and a flexible bureaucratic structure. The study recommends strengthening human resource capacity, streamlining bureaucratic procedures, enhancing community participation, and reinforcing monitoring and evaluation systems. These improvements are essential to ensure that poverty alleviation programs are executed effectively, efficiently, and targeted to those who need them most. By addressing these critical factors, local governments can significantly reduce poverty levels and promote sustainable community welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparat terkait, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan program-program yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan anggaran yang tidak mencukupi. Selain itu, komunikasi antara lembaga pelaksana belum berjalan secara efektif dan konsisten, menyebabkan terjadinya miskomunikasi dalam pelaksanaan program. Disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan juga masih belum merata, di mana sebagian besar pelaksana menunjukkan kurangnya inisiatif dan keterlibatan aktif. Struktur birokrasi yang kaku dan berjenjang memperlambat koordinasi serta proses pengambilan keputusan. Padahal, kemiskinan sebagai isu multidimensional membutuhkan respons yang cepat dan kolaboratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keterpaduan komunikasi yang efektif, kecukupan sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang adaptif. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan alur birokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi kebijakan agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

*Corresponding Author

Email : hanifah.sasabelaa@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Kemiskinan pada dasarnya menggambarkan kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk mencapai kehidupan yang layak. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya dapat dipahami sebagai rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap sumber daya dan pelayanan yang mendukung peningkatan kesejahteraan (Telaumbanua et al., 2023). Kompleksitas tersebut menyebabkan penanggulangan kemiskinan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai sektor serta pemangku kepentingan.

Permasalahan kemiskinan juga menjadi salah satu agenda utama pembangunan global. Upaya pengurangan kemiskinan sebelumnya menjadi bagian dari Millennium Development Goals (MDGs), yang salah satu tujuannya adalah mengurangi kemiskinan ekstrem dan kelaparan. Setelah berakhirnya periode MDGs pada tahun 2015, agenda tersebut dilanjutkan melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang berlaku hingga tahun 2030. Tujuan pertama SDGs, yaitu No Poverty, menempatkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk sebagai salah satu prioritas pembangunan global. Agenda tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat, perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses pelayanan dasar, dan penguatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, penanggulangan kemiskinan merupakan bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan menegaskan pentingnya percepatan dan koordinasi berbagai program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilaksanakan oleh satu lembaga secara parsial, tetapi memerlukan koordinasi antarsektor dan antarlembaga, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan permasalahan masyarakat di daerah masing-masing.

Salah satu daerah yang masih menghadapi persoalan tersebut adalah Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang dikutip oleh detikSumbagsel (2023), Provinsi Lampung memiliki persentase penduduk miskin sebesar 11,44 persen dan berada pada urutan ke-13 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Pada tingkat kabupaten/kota, kondisi kemiskinan di Provinsi Lampung menunjukkan variasi yang cukup besar. Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), persentase penduduk miskin tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Utara sebesar 17,17 persen, sedangkan persentase terendah terdapat di Kabupaten Mesuji sebesar 6,73 persen. Sementara itu, Kota Bandar Lampung memiliki persentase penduduk miskin sebesar 7,77 persen (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan [Kemenko PMK], 2023).

Kota Bandar Lampung memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Provinsi Lampung sekaligus salah satu pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata di wilayah tersebut. Potensi ekonomi tersebut secara teoritis dapat menjadi modal penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan tingkat

kemiskinan. Namun, keberadaan berbagai potensi ekonomi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Persentase penduduk miskin sebesar 7,77 persen menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi maupun pelayanan publik. Kondisi ini memperlihatkan adanya tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan potensi ekonomi daerah dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh kelompok masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan program yang melibatkan perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai wadah koordinasi dalam merumuskan, mengintegrasikan, dan mengendalikan berbagai program penanggulangan kemiskinan. BAPPERIDA Kota Bandar Lampung memiliki posisi penting dalam koordinasi tersebut, khususnya dalam aspek perencanaan pembangunan, penelitian, dan inovasi daerah. Pembentukan dan pelaksanaan TKPKD diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai program yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak berjalan secara sektoral.

Secara kelembagaan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung didukung oleh berbagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi berbeda. Kelompok program bantuan sosial dan jaminan sosial melibatkan antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Perumahan dan Permukiman. Sementara itu, kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta perangkat daerah terkait lainnya. Keterlibatan berbagai perangkat daerah tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan koordinasi lintas sektor agar program yang dilaksanakan dapat saling melengkapi dan menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Bandar Lampung juga memiliki landasan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung, penurunan kemiskinan menjadi salah satu sasaran pembangunan yang diarahkan melalui peningkatan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah. Selain itu, pemerintah daerah menetapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melalui keputusan kepala daerah sebagai instrumen kelembagaan untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dan dilaksanakan oleh organisasi pelaksana di tingkat daerah.

Data perkembangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin selama periode 2014–2023 (Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023). Penurunan tersebut dapat menjadi indikator adanya upaya pemerintah daerah dalam menangani persoalan kemiskinan. Meskipun demikian, penurunan angka kemiskinan secara agregat belum secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh proses implementasi kebijakan telah berjalan secara optimal. Keberhasilan implementasi perlu dilihat dari proses pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarorganisasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta mekanisme birokrasi yang digunakan dalam menjalankan program.

Persoalan implementasi menjadi penting karena kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak selalu menghasilkan capaian yang sesuai dengan tujuan apabila terdapat hambatan pada tahap pelaksanaannya. Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan sejauh mana tujuan dan standar kebijakan dapat disampaikan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan sikap, kemauan, dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan prosedur, pembagian kewenangan, dan mekanisme organisasi yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung, keempat variabel tersebut menjadi penting untuk dikaji karena kebijakan melibatkan banyak perangkat daerah dengan tugas, kewenangan, dan karakteristik organisasi yang berbeda. Banyaknya aktor yang terlibat dapat menimbulkan persoalan koordinasi apabila komunikasi tidak berjalan secara efektif. Demikian pula, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dapat memengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan program. Pada sisi lain, komitmen dan inisiatif pelaksana juga menentukan sejauh mana program dapat dilaksanakan secara aktif dan responsif. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan hierarkis juga berpotensi memperlambat proses koordinasi dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk melihat penanggulangan kemiskinan tidak hanya dari perubahan angka kemiskinan, tetapi juga dari proses implementasi kebijakan yang berlangsung di tingkat daerah. Penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh pelaksana, khususnya melalui koordinasi BAPPERIDA dan TKPKD. Kajian ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung tahun 2023 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dengan fokus kajian pada BAPPERIDA Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memperkuat koordinasi, kapasitas sumber daya, komitmen pelaksana, dan efektivitas struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung tahun 2023. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai proses pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi dan pengalaman para pelaksana serta penerima kebijakan (Moleong, 2017).

Penelitian dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bandar Lampung dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dengan informan

yang terdiri atas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPERIDA, staf BAPPERIDA, Sekretaris Dinas Sosial, Lurah Penengahan Raya, serta warga penerima bantuan. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Fokus penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III (1980) yang mencakup empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi dianalisis melalui kejelasan dan konsistensi penyampaian kebijakan serta koordinasi antaraktor. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, informasi, dan sarana pendukung. Disposisi mencakup komitmen, motivasi, dan sikap pelaksana, sedangkan struktur birokrasi mencakup pembagian tugas, prosedur kerja, dan koordinasi antarinstansi.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa peraturan, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, data Badan Pusat Statistik (BPS), dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dengan hasil observasi dan dokumen yang relevan untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Moleong, 2017; Patton, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat dipahami hanya melalui rendahnya pendapatan masyarakat. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan layak, dan kebutuhan dasar lainnya dapat memperkuat kerentanan rumah tangga miskin dan mempertahankan mereka dalam lingkaran kemiskinan (Murdiyana, 2017). Atas dasar tersebut, penanggulangan kemiskinan membutuhkan intervensi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Di Kota Bandar Lampung, penanggulangan kemiskinan pada tahun 2023 dilaksanakan melalui kombinasi kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pelayanan dasar, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Implementasi kebijakan tersebut secara formal telah memiliki landasan perencanaan dan kelembagaan melalui dokumen pembangunan daerah serta mekanisme koordinasi penanggulangan kemiskinan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan program dan kelembagaan tersebut belum secara otomatis menjamin efektivitas implementasi di tingkat masyarakat.

Salah satu persoalan mendasar terletak pada mekanisme penetapan sasaran. Pemerintah menggunakan data kesejahteraan dan pendekatan *by name by address* untuk mengidentifikasi masyarakat yang menjadi sasaran intervensi. Data di Kecamatan Kedaton, misalnya, menunjukkan terdapat 196 kepala keluarga (KK) yang termasuk dalam tiga desil kesejahteraan terendah, terdiri atas 72 KK pada Desil 1, 75 KK pada Desil 2, dan 49 KK pada Desil 3. Kelurahan Kedaton memiliki jumlah KK terbanyak pada ketiga desil tersebut, sedangkan beberapa kelurahan lainnya memiliki jumlah yang lebih rendah.

Data tersebut penting sebagai instrumen pemetaan, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai gambaran yang sepenuhnya statis mengenai kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi

rumah tangga bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh perubahan pekerjaan, pendapatan, komposisi keluarga, perpindahan tempat tinggal, maupun perubahan status sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak melaporkan perubahan tersebut secara administratif sehingga terdapat potensi ketidaksesuaian antara kondisi faktual dan data yang digunakan pemerintah. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata ketersediaan data, melainkan kemampuan pemerintah memastikan bahwa data terus diperbarui dan memiliki mekanisme verifikasi yang responsif.

Secara makro, kondisi kemiskinan Kota Bandar Lampung menunjukkan kecenderungan membaik. Jumlah penduduk miskin menurun dari 98,76 ribu jiwa atau 9,11% pada tahun 2021 menjadi 90,51 ribu jiwa atau 8,21% pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi 87,08 ribu jiwa atau 7,77% pada tahun 2023. Pada periode yang sama, garis kemiskinan meningkat dari Rp654.576 menjadi Rp761.790 per kapita per bulan. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa penurunan tersebut sepenuhnya merupakan dampak langsung dari program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah. Indikator kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial sehingga keberhasilan program perlu dinilai tidak hanya berdasarkan perubahan angka kemiskinan, tetapi juga berdasarkan ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, keberlanjutan pemberdayaan, dan kemampuan rumah tangga keluar dari ketergantungan terhadap bantuan.

Dalam praktiknya, program pemerintah mencakup bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, pelatihan keterampilan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kombinasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata bersifat karitatif menuju pendekatan yang mulai menggabungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi. Namun, efektivitas pendekatan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas implementasi di tingkat lokal.

Temuan ini menjadi lebih jelas apabila dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Subarsono, 2011; Widodo, 2010). Keempat variabel tersebut tidak bekerja secara terpisah. Kelemahan dalam satu variabel dapat memperkuat persoalan pada variabel lainnya.

Komunikasi Kebijakan

Komunikasi merupakan salah satu determinan penting dalam implementasi karena kebijakan harus dipahami oleh pelaksana dan kelompok sasaran sebelum dapat diterapkan secara efektif. Edward III mengidentifikasi tiga aspek penting dalam komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi pesan (Subarsono, 2011).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung telah berlangsung melalui struktur birokrasi yang berjenjang. Informasi dan kebijakan dari pemerintah pusat diteruskan kepada pemerintah daerah, kemudian diterjemahkan oleh OPD dan disampaikan kepada kecamatan, kelurahan, pendamping sosial, hingga masyarakat. Pada tingkat lokal, komunikasi dilakukan melalui RT, forum masyarakat, PKK, Dasa Wisma, pendamping sosial, dan media komunikasi seperti WhatsApp.

Diah Sulistiorini menjelaskan bahwa proses transmisi juga berkaitan erat dengan verifikasi data penerima bantuan:

“Khusus dalam penanganan kemiskinan, transmisi kebijakan diwujudkan melalui proses verifikasi dan validasi data *by name by address*.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya berbentuk penyampaian informasi, tetapi juga diterjemahkan ke dalam prosedur administratif untuk menentukan penerima program. Artinya, komunikasi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan memiliki dimensi teknokratis sekaligus sosial.

Namun, penelitian menemukan bahwa transmisi informasi belum sepenuhnya menghasilkan pemahaman yang sama antara pemerintah dan masyarakat. Sebagian masyarakat masih memahami bahwa pelaporan perubahan kondisi keluarga kepada RT secara otomatis akan mengubah status mereka dalam basis data penerima bantuan. Padahal, perubahan tersebut membutuhkan proses administratif dan verifikasi lebih lanjut. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan telah berjalan pada level penyampaian pesan, tetapi belum sepenuhnya berhasil pada level pembentukan pemahaman.

Persoalan tersebut penting secara kritis karena ketidaktepatan data sering kali dipandang sebagai kesalahan masyarakat yang tidak melaporkan perubahan kondisi. Padahal, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk membangun mekanisme pembaruan data yang mudah diakses, sederhana, dan proaktif. Dengan demikian, masalah komunikasi tidak seharusnya diletakkan sepenuhnya pada rendahnya literasi administratif masyarakat.

Selain kejelasan, konsistensi informasi menjadi persoalan yang lebih kompleks. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan data antarinstansi akibat penggunaan sumber data yang berbeda. BAPPERIDA, Dinas Sosial, dan instansi lainnya dapat menggunakan basis data atau indikator yang berbeda sesuai dengan sumber kelebagaannya. Kondisi ini berpotensi menghasilkan perbedaan dalam menentukan siapa yang dianggap miskin, rentan, atau layak menerima bantuan.

Dengan demikian, persoalan komunikasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan bukan hanya persoalan bagaimana informasi disampaikan, tetapi juga mengenai siapa yang memiliki otoritas atas informasi dan data tersebut. Apabila terdapat lebih dari satu basis data yang digunakan oleh berbagai OPD, maka komunikasi antarlembaga akan menghadapi persoalan konsistensi sejak awal. Dalam konteks ini, integrasi data merupakan bagian integral dari komunikasi kebijakan, bukan sekadar persoalan teknologi informasi.

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan

Dalam perspektif Edward III, kebijakan yang telah dikomunikasikan dengan baik tetap tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung sumber daya yang memadai. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, informasi, serta kewenangan pelaksana (Widodo, 2010).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa persoalan sumber daya manusia merupakan salah satu hambatan penting pada tingkat kelurahan. Pemerintah daerah telah memiliki aparatur dan tenaga pendamping, tetapi kapasitas teknis tidak selalu merata. Keterbatasan kemampuan teknologi informasi, khususnya dalam proses input dan pemutakhiran data, berpotensi memengaruhi kualitas implementasi program yang semakin bergantung pada sistem digital.

Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks dalam digitalisasi kebijakan sosial. Pemerintah mendorong penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, tetapi kapasitas aparatur pada tingkat pelaksana belum sepenuhnya mengikuti tuntutan digitalisasi tersebut. Akibatnya, teknologi yang seharusnya menjadi instrumen penyelesaian masalah justru dapat menjadi sumber hambatan baru apabila tidak disertai peningkatan kapasitas manusia.

Persoalan sumber daya juga terlihat dalam aspek anggaran. Meskipun program

penanggulangan kemiskinan memperoleh dukungan anggaran melalui APBN dan APBD, kelurahan memiliki ruang fiskal yang terbatas untuk mengembangkan inovasi sesuai karakteristik lokal. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kemampuan kelurahan untuk bergerak dari sekadar pelaksana administratif menjadi aktor pemberdayaan masyarakat.

Hal ini penting karena karakteristik kemiskinan di tingkat lokal tidak selalu seragam. Intervensi yang efektif pada satu kelurahan belum tentu sesuai dengan kelurahan lainnya. Ketika kewenangan dan anggaran lokal terbatas, implementasi cenderung bersifat seragam dan *top-down*. Akibatnya, kebijakan dapat memenuhi prosedur administratif, tetapi belum tentu sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

Persoalan paling krusial dalam sumber daya adalah informasi. Data yang tidak mutakhir dapat menghasilkan dua kesalahan sekaligus, yaitu *inclusion error*, ketika masyarakat yang tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan, dan *exclusion error*, ketika masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru tidak menerima bantuan. Kedua kesalahan tersebut bukan hanya persoalan administratif, tetapi dapat memengaruhi legitimasi kebijakan.

Apabila masyarakat miskin yang memenuhi kriteria tidak memperoleh bantuan sementara kelompok lain menerimanya, maka persepsi ketidakadilan dapat berkembang. Oleh sebab itu, kualitas data harus dipandang sebagai bagian dari sumber daya kebijakan yang sama pentingnya dengan anggaran dan sumber daya manusia.

Disposisi Pelaksana

Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan kecenderungan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Pelaksana yang memahami kebijakan tetapi tidak memiliki komitmen dapat menyebabkan implementasi tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Subarsono, 2011).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terdapat kecenderungan positif dari aparaturnya terhadap program penanggulangan kemiskinan. BAPPERIDA menjalankan fungsi perencanaan, koordinasi, dan pelaporan, sedangkan Dinas Sosial melibatkan TKSK, PSM, dan pendamping PKH dalam proses verifikasi serta pendampingan masyarakat.

Komitmen juga terlihat pada tingkat kelurahan. Diding Sagita, selaku Lurah Penengahan Raya, menunjukkan keterlibatan dalam pemutakhiran data dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga pada inisiatif aparaturnya di tingkat lokal.

Namun, disposisi positif pelaksana belum sepenuhnya dapat mengatasi persoalan struktural. Aparaturnya yang memiliki komitmen tinggi tetap menghadapi keterbatasan kewenangan, kapasitas teknis, data, dan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan atau keterbatasan implementasi tidak tepat apabila semata-mata dijelaskan melalui rendahnya komitmen pelaksana.

Temuan tersebut memberikan implikasi penting terhadap teori implementasi. Disposisi pelaksana harus dibaca dalam hubungan dengan struktur dan sumber daya. Pelaksana dapat memiliki komitmen yang tinggi, tetapi ruang geraknya tetap terbatas apabila sistem tidak memberikan kewenangan dan sumber daya yang cukup.

Di sisi lain, terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat mengenai bantuan sosial. Pemerintah memandang bantuan sebagai instrumen perlindungan sosial yang diberikan berdasarkan kriteria tertentu, sedangkan sebagian masyarakat memandang bantuan sebagai hak yang seharusnya diterima secara berkelanjutan. Perbedaan persepsi tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan ketika seseorang dikeluarkan dari daftar penerima.

Karena itu, komitmen pelaksana tidak cukup diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prosedur. Komitmen juga perlu diwujudkan dalam kemampuan menjelaskan kebijakan secara

terbuka, menangani keluhan masyarakat, dan membangun pemahaman bahwa tujuan akhir penanggulangan kemiskinan bukan mempertahankan status penerima bantuan, tetapi meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian rumah tangga.

Struktur Birokrasi dan Fragmentasi Implementasi

Struktur birokrasi merupakan variabel penting karena implementasi kebijakan melibatkan banyak organisasi dengan tugas dan kewenangan berbeda. Edward III menempatkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi sebagai dua aspek utama yang memengaruhi implementasi (Winarno, 2005).

Secara kelembagaan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memiliki pembagian fungsi yang relatif jelas. BAPPERIDA berperan dalam perencanaan dan koordinasi, sedangkan Dinas Sosial memiliki peran dalam pelaksanaan program sosial. Kecamatan dan kelurahan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Namun, struktur formal tersebut belum sepenuhnya menghasilkan integrasi dalam pelaksanaan.

Diah Sulistiorini menjelaskan: "BAPPERIDA berperan dalam memfasilitasi penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan yang tercantum dalam dokumen perencanaan, seperti RPJMD dan Renstra OPD. Selain itu, BAPPERIDA juga bertanggung jawab dalam proses pengumpulan data kemiskinan, yang berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan intervensi yang tepat sasaran."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara formal BAPPERIDA telah menjalankan fungsi koordinatif. Namun, koordinasi tidak selalu identik dengan integrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPD masih memiliki kecenderungan menjalankan program berdasarkan tugas pokok dan sumber data masing-masing.

Niken Adelia mengungkapkan: "Pentingnya integrasi sistem data kemiskinan yang dapat diakses oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, keberadaan satu sistem data terpadu akan memungkinkan sinkronisasi antarprogram dan meminimalkan terjadinya tumpang tindih penerima bantuan."

Temuan ini memperlihatkan bahwa fragmentasi merupakan salah satu persoalan struktural yang paling nyata. Fragmentasi tidak hanya terjadi karena pembagian tugas antarorganisasi, tetapi juga karena perbedaan basis data, indikator, dan mekanisme pelaporan. Akibatnya, masyarakat yang sama dapat dipandang berbeda oleh instansi yang berbeda.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut menunjukkan adanya *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi. Pemerintah telah membangun struktur kelembagaan dan sistem perencanaan, tetapi integrasi pada tingkat operasional masih menghadapi hambatan.

Permasalahan tersebut juga menunjukkan bahwa koordinasi tidak cukup dilakukan melalui rapat antarinstansi. Koordinasi yang efektif membutuhkan mekanisme berbagi data, pembagian kewenangan yang jelas, indikator yang seragam, serta sistem evaluasi lintas sektor. Tanpa mekanisme tersebut, koordinasi berisiko menjadi aktivitas administratif tanpa menghasilkan integrasi substantif.

Diding Sagita juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi membutuhkan mekanisme umpan balik yang memungkinkan pemerintah mengidentifikasi penyimpangan dan memperbaiki program berdasarkan kondisi lapangan.

Dari perspektif masyarakat, Budi Suhendra menyampaikan bahwa proses pengajuan bantuan melalui PKH relatif mudah dan tidak mengalami hambatan berarti. Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pengalaman antara level pelayanan langsung dan level koordinasi antarinstansi. Pada tingkat kelurahan, prosedur dapat dirasakan sederhana

oleh penerima manfaat, tetapi pada tingkat sistem pemerintahan terdapat persoalan koordinasi dan integrasi yang lebih kompleks.

Efektivitas Implementasi dan Persoalan Ketepatan Sasaran

Jika keempat variabel Edward III dianalisis secara simultan, implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung tahun 2023 dapat dikatakan berjalan secara administratif, tetapi belum sepenuhnya optimal secara substantif. Pemerintah telah memiliki program, struktur kelembagaan, sumber daya, dan mekanisme koordinasi. Namun, masih terdapat kesenjangan antara tersedianya instrumen kebijakan dan kemampuan instr terdapat pada persoalan integrasi data. Data merupakan fondasi bagi komunikasi, penetapan sasaran, distribusi bantuan, monitoring, dan evaluasi. Ketika data tidak sinkron, maka kesalahan dapat terjadi sejak tahap penetapan sasaran dan kemudian terbawa hingga tahap pelaksanaan. Persoalan ketepatan sasaran merupakan persoalan tata kelola. Pemerintah perlu memastikan siapa yang berwenang mengelola data, bagaimana data diperbarui, umen tersebut menghasilkan intervensi yang benar-benar responsif terhadap kondisi masyarakat miskin.

Kelemahan paling menonjol terdapat pada persoalan integrasi data. Data merupakan fondasi bagi komunikasi, penetapan sasaran, distribusi bantuan, monitoring, dan evaluasi. Ketika data tidak sinkron, maka kesalahan dapat terjadi sejak tahap penetapan sasaran dan kemudian terbawa hingga tahap pelaksanaan.

Persoalan ini juga menunjukkan bahwa ketepatan sasaran tidak hanya merupakan persoalan teknis pendataan. Ketepatan sasaran merupakan persoalan tata kelola. Pemerintah perlu memastikan siapa yang berwenang mengelola data, bagaimana data diperbarui, bagaimana masyarakat dapat mengajukan koreksi, dan bagaimana perubahan kondisi sosial ekonomi diverifikasi.

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan masih menghadapi kecenderungan *program-oriented* dibandingkan *problem-oriented*. Pemerintah telah memiliki berbagai program, tetapi integrasi antarpogram belum sepenuhnya menunjukkan satu strategi intervensi yang berbasis pada kebutuhan spesifik rumah tangga. Bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pelatihan, dan UMKM masih perlu dihubungkan melalui mekanisme *graduation* atau transisi penerima dari ketergantungan bantuan menuju kemandirian ekonomi.

Dalam konteks tersebut, keberhasilan kebijakan tidak seharusnya hanya diukur melalui jumlah bantuan yang tersalurkan atau jumlah program yang dilaksanakan. Indikator keberhasilan perlu diperluas pada perubahan kondisi penerima, seperti peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan rumah tangga keluar dari kerentanan.

Penurunan angka kemiskinan Kota Bandar Lampung menjadi indikator positif, tetapi belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan implementasi secara keseluruhan. Penurunan tersebut perlu dibaca bersama dengan persoalan eksklusi penerima, kualitas data, keberlanjutan program pemberdayaan, serta kemampuan pemerintah mencegah masyarakat yang baru keluar dari kemiskinan kembali jatuh ke dalam kondisi miskin.

Implikasi Temuan terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Temuan penelitian memberikan tiga implikasi utama. Pertama, pemerintah perlu memperkuat integrasi data kemiskinan sebagai fondasi implementasi kebijakan. Satu basis data yang dapat digunakan lintas OPD perlu disertai mekanisme pemutakhiran berkala dan kanal koreksi dari masyarakat. Hal tersebut penting untuk mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi.

Kedua, penguatan kapasitas aparatur tingkat kelurahan perlu menjadi bagian dari strategi implementasi. Digitalisasi administrasi tidak akan efektif apabila tidak disertai pelatihan, pendampingan teknis, dan distribusi sumber daya manusia yang memadai. Kelurahan juga perlu diberikan ruang kewenangan yang lebih besar untuk mengidentifikasi dan merespons karakteristik kemiskinan lokal.

Ketiga, kebijakan perlu bergerak dari pendekatan bantuan menuju pendekatan pemberdayaan yang lebih terintegrasi. Bantuan sosial tetap penting sebagai instrumen perlindungan masyarakat miskin, tetapi perlu dikombinasikan dengan pelatihan, akses modal, pendampingan usaha, dan penguatan akses terhadap pasar. Dengan demikian, bantuan sosial tidak berhenti sebagai mekanisme perlindungan jangka pendek, tetapi menjadi pintu masuk menuju peningkatan kemandirian ekonomi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan utama penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung bukan terletak pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas implementasinya. Komunikasi telah tersedia tetapi belum selalu menghasilkan pemahaman yang seragam; sumber daya tersedia tetapi belum merata; disposisi pelaksana relatif positif tetapi dibatasi oleh persoalan struktural; dan struktur birokrasi telah terbentuk tetapi masih menghadapi fragmentasi.

Dengan demikian, penguatan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan membutuhkan perubahan dari sekadar memperbanyak program menuju perbaikan tata kelola implementasi. Pemerintah daerah perlu memastikan integrasi data, memperkuat kapasitas pelaksana, meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperluas kewenangan di tingkat lokal, serta membangun sistem monitoring yang mengukur dampak program terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Pendekatan tersebut akan membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung tahun 2023 telah menunjukkan capaian positif, yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan dari 8,81% pada tahun 2020 menjadi 7,77% pada tahun 2023. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan teori George C. Edward III, aspek komunikasi masih menghadapi kendala dalam konsistensi informasi dan koordinasi antarlembaga. Dari sisi sumber daya, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran menjadi hambatan utama. Disposisi pelaksana belum merata karena masih terdapat pelaksana yang kurang proaktif, sedangkan struktur birokrasi yang hierarkis menyebabkan proses koordinasi dan pengambilan keputusan berjalan lambat. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan memerlukan penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang lebih adaptif dan responsif.

REFERENSI

- Abidin, S. (2012). *Kebijakan publik*. Pancur Siwah.
- Abikusna, R. A. (2019). Kewenangan pemerintah daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Sosfilkom*, 13(1).
- Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan dan faktor-faktor penyebabnya. *Journal of Social Work and Social Service*, 1, 43–50.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.

- Alfisyahrin, D. (2021). Optimalisasi fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam perspektif diskresi kebijakan penanganan. *Jurnal Media Administrasi*, 3, 89–99.
- Anderson, J. E. (1978). *Public policymaking* (3rd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Arifin, A. (2017). Strategi manajemen perubahan dalam meningkatkan disiplin di perguruan tinggi. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 117–132.
- Arifin, R. (2011). *Administrasi publik*. Graha Ilmu.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif*. Pustaka Ilmu.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3).
- Hernandez, M. (2022). Effective policy implementation: Strategies and challenges. *Journal of Public Administration*.
- Kartono, K. (1997). *Pendidikan sepanjang hayat*. Bumi Aksara.
- Leiwakabessy, T. F. F. (2020). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem informasi akuntansi terhadap proses pelaporan keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(1).
- Lukman, M. (2013). Peran diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah*, 15(1).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2009). *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang*. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2012). *Kebijakan publik*. Elex Media Komputindo.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods*. Sage Publications.
- Remi, S., & Tjiptoherijanto, P. (2002). *Kemiskinan dan strategi penanggulangannya*. UI Press.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.
- Soeharto, E., et al. (2004). *Pembangunan kesejahteraan sosial*. Alfabeta.
- Sumaryadi, I. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Citra Utama.
- Telaumbanua, F., & Ndraha, B. (2023). Perspektif ekologi manajemen di Kabupaten Nias. *[Nama jurnal perlu dilengkapi]*.
- Wahab, S. A. (2006). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2012). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*. Rajawali Pers.
- Wibawa, S. (2000). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*. RajaGrafindo Persada.
- Widodo, J. (2010). *Analisis kebijakan publik*. Bayumedia.
- Widodo, J. (2011). *Good governance: Telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era otonomi daerah*. Insan Cendekia.
- Winarno, B. (2005). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. MedPress.